

# **SKRIPSI**

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**M. YUSUF INDRAWAN**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

# **SKRIPSI**

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI SULAWESI SELATAN**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**M. YUSUF INDRAWAN**  
**A31109279**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

# **SKRIPSI**

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI SULAWESI SELATAN**

disusun dan diajukan oleh

**M. YUSUF INDRAWAN**  
**A31109279**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 16 Agustus 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., M.Soc.Sc., Ak.  
NIP 196703191992032003

Dra. Hj. Nirwana, M.Si., Ak.  
NIP 196511271991032001

Ketua Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak.  
NIP 196503051992032001

# SKRIPSI

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

**M. YUSUF INDRAWAN**  
**A31109279**

telah dipertahankan dalam siding ujian skripsi  
pada tanggal **11 Oktober 2013** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

| No | Nama Penguji                                  | Jabatan    | Tanda Tangan |
|----|---|------------|--------------|
| 1  | Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., M.Soc.Sc., Ak. | Ketua      | 1. ....      |
| 2  | Dra. Hj. Nirwana, M.Si., Ak.                  | Sekretaris | 2. ....      |
| 3  | Dra. Hj. Sri Sundari, M.Si., Ak.              | Anggota    | 3. ....      |
| 4  | Drs. Asri Usman, M.Si., Ak.                   | Anggota    | 4. ....      |

Ketua Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak.  
NIP 196503051992032001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : M. Yusuf Indrawan

NIM : A311 09 279

jurusan/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Oktober 2013  
Yang membuat pernyataan,

M. Yusuf Indrawan

## PRAKATA

*Alhamdulillah Rabbil Alamin.* Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah, Muhammad SAW, keluarga, beserta sahabat-sahabat beliau. Semoga syafaatnya terlimpah kepada kita semua di yaumul qiyamah nanti. Amin.

Gagasan yang mendasari penelitian ini adalah faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Gagasan ini diperkuat dengan adanya bukti *research gap* yang terjadi di keadaan sebenarnya dengan teori yang telah dipelajari. Dengan demikian, peneliti ingin melakukan penelitian dalam topik ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas budi baik dan peranserta para pihak yang telah membantu.

Pertama-tama, peneliti menyampaikan terima kasih kepada Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., M.Soc.Sc., Ak. dan Dra. Hj. Nirwana, M.Si, Ak. selaku pembimbing peneliti. Kedua pembimbing peneliti merupakan pembimbing yang senantiasa membantu peneliti pada saat peneliti memiliki kendala dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, mereka memberikan masukan, arahan, dan nasihat yang dapat meyakinkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada tim penguji: Drs. H. Harryanto, M.Com., Ph.D., Dra. Hj. Sri Sundari, M.Si., Ak., dan Drs. Asri Usman, M.Si., Ak. Mereka telah berkenan hadir dalam seminar proposal, ujian komprehensif, dan ujian skripsi, serta bersedia memberikan saran dan masukan dalam menyempurnakan skripsi ini.

Terima kasih kepada Drs. M. Ishak Amsari, M.Si., Ak. selaku penasehat akademik peneliti, atas semangat dan bimbingannya bagi peneliti selama ini, mulai dari awal studi hingga selesainya peneliti menempuh studi.

Terima kasih kepada seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Dekan dan para Wakil Dekan, Ketua dan Sekertaris Jurusan Akuntansi, dosen-dosen, khususnya kepada dosen yang pernah mengajar peneliti, pegawai akademik, dan kemahasiswaan, mama-mama di kantin dan foto copy. Terima kasih juga kepada staf Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Selatan yang telah membantu peneliti memperoleh data yang dibutuhkan.

Terima kasih kepada sahabat-sahabat peneliti dan teman-teman mahasiswa lainnya. Terima kasih kepada Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA) dan teman-teman KKN Gelombang 82 Kecamatan Sabbang Paru yang memberi pengalaman berharga kepada peneliti.

Terima kasih dan penghargaan tulus kepada kedua orang tua Ir. Rajendra dan Dra. Mujahida yang telah senantiasa berdoa dan memberikan dukungan moril dan materil kepada peneliti dalam menyelesaikan studi. Mereka telah menanamkan pada peneliti sikap positif terhadap ilmu pengetahuan serta senantiasa mengingatkan bahwa Allah SWT akan menaikkan setingkat lebih tinggi derajat orang yang berilmu. Terima kasih kepada saudara-saudara peneliti, Ahmad Wira Indrawan dan Siti Ainun Indarajati, atas doa dan dukungan yang diberikan kepada peneliti. Terima kasih kepada Dian Pertiwi atas dukungan, pengalaman, dan kenangan yang luar biasa baik dalam studi maupun dalam hidup peneliti. Peneliti hanya dapat menyampaikan terima kasih, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Amin.

Makassar, Oktober 2013

M. Yusuf Indrawan

## ABSTRAK

### Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan

### *Factors Affecting Financial Performance of The Local Government on South Sulawesi*

M. Yusuf Indrawan  
Ratna Ayu Damayanti  
Nirwana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor-faktor yang digunakan adalah PAD, *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage*. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Intergovernmental revenue* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** kinerja keuangan, PAD, *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah, *leverage*

*This study aimed to analyze the factors that affect the financial performance of local government on the province of South Sulawesi. The factors used are revenue (PAD), intergovernmental revenue, the size of local government, and leverage. The data of this study using secondary data that the financial statements local government on the province of South Sulawesi in 2009-2011. This study uses multiple linear regression analysis model. Results of this study indicated that the PAD and the size of local government are factors that affect the financial performance of local government. Intergovernmental revenue and leverage had no effect on financial performance of local government.*

**Keywords:** *financial performance, PAD, intergovernmental revenue, size of local government, leverage*

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL.....   | i    |
| HALAMAN JUDUL.....  | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....   | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....   | iv   |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....   | v    |
| PRAKATA.....  | vi   |
| ABSTRAK.....  | viii |
| DAFTAR ISI.....   | ix   |
| DAFTAR TABEL.....   | xii  |
| DAFTAR GAMBAR.....  | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN .....   | xiv  |
| <br>  |      |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....   | 5    |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....  | 7    |
| 1.4 Kegunaan Penelitian .....   | 7    |
| 1.4.1 Kegunaan Teoretis .....   | 7    |
| 1.4.2 Kegunaan Praktis .....  | 7    |
| 1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....   | 8    |
| 1.6 Organisasi/Sistematika.....   | 8    |
| <br>  |      |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....   | 10   |
| 2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....   | 10   |
| 2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....   | 13   |
| 2.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....   | 15   |
| 2.2.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah.....  | 16   |
| 2.2.3 Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran .....   | 16   |
| 2.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan .....   | 17   |
| 2.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....   | 18   |
| 2.3.2 <i>Intergovernmental Revenue</i> .....  | 19   |
| 2.3.3 Ukuran Pemerintah Daerah.....   | 20   |
| 2.3.4 <i>Leverage</i> .....   | 21   |
| 2.4 Penelitian Terdahulu .....  | 22   |
| 2.5 Kerangka Pemikiran.....   | 25   |
| 2.6 Perumusan Hipotesis.....  | 25   |
| 2.6.1 Pengaruh PAD terhadap Kinerja<br>Keuangan Pemerintah Daerah .....                             | 25   |
| 2.6.2 Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> terhadap Kinerja<br>Keuangan Pemerintah daerah..... | 26   |

|  |    |
|--|----|
| 2.6.3 Pengaruh Ukuran Pemda terhadap Kinerja Keuangan<br>Pemerintah Daerah .....                     | 27 |
| 2.6.4 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan<br>Pemerintah Daerah .....                  | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN .....  | 29 |
| 3.1 Rancangan Penelitian .....   | 29 |
| 3.2 Populasi dan Sampel.....   | 30 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data .....  | 31 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data .....  | 31 |
| 3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalisasi .....  | 31 |
| 3.5.1 Variabel Penelitian .....  | 31 |
| 3.5.2 Definisi Operasionalisasi .....  | 31 |
| 3.6 Metode Analisis Data .....   | 34 |
| 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif .....  | 34 |
| 3.6.2 Model Analisis Data .....  | 34 |
| 3.6.3 Uji Asumsi Klasik .....  | 35 |
| 3.6.3.1 Uji Multikolinieritas.....   | 35 |
| 3.6.3.2 Uji Autokorelasi.....  | 36 |
| 3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas .....   | 37 |
| 3.6.3.4 Uji Normalitas .....   | 38 |
| 3.6.4 Uji Hipotesis.....   | 38 |
| 3.6.4.1 Koefisien Determinasi.....   | 38 |
| 3.6.4.2 Uji <i>t</i> .....   | 39 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN .....  | 40 |
| 4.1 Deskripsi Data .....   | 40 |
| 4.2 Pengujian Hipotesis.....   | 41 |
| 4.2.1 Uji Asumsi Klasik.....   | 41 |
| 4.2.1.1 Uji Multikolinearitas .....  | 41 |
| 4.2.1.2 Uji Autokorelasi.....  | 42 |
| 4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas.....   | 43 |
| 4.2.1.4 Uji Normalitas.....  | 44 |
| 4.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda .....   | 45 |
| 4.2.2.1 Hasil Regresi.....   | 45 |
| 4.2.2.2 Analisis Model.....  | 46 |
| 4.2.3 Hasil Uji Hipotesis .....  | 47 |
| 4.2.3.1 Koefisien Determinasi .....  | 47 |
| 4.2.3.2 Uji <i>t</i> .....   | 48 |
| 4.3 Pembahasan .....   | 49 |
| 4.3.1 Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan<br>Pemerintah Daerah .....                              | 49 |
| 4.3.2 Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> terhadap<br>Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ..... | 50 |
| 4.3.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap<br>Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....         | 51 |

|   |    |
|---|----|
| 4.3.4 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan<br>Pemerintah Daerah ..... | 51 |
| BAB V PENUTUP .....   | 53 |
| 5.1 Kesimpulan.....   | 53 |
| 5.2 Saran.....  | 54 |
| 5.3 Keterbatasan Penelitian .....   | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 56 |
| LAMPIRAN .....  | 61 |

## DAFTAR TABEL

| Tabel   | Halaman |
|---|---------|
| 3.1 Sampel Penelitian .....                   | 30      |
| 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif ..... | 40      |
| 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....          | 41      |
| 4.3 Hasil Analisis Regresi.....               | 45      |
| 4.4 Hasil Uji Hipotesis .....                 | 47      |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar  | Halaman |
|---|---------|
| 2.1 Kerangka Pemikiran .....                  | 25      |
| 3.1 Uji Autokorelasi .....                    | 36      |
| 4.1 Hasil Uji Autokorelasi .....              | 42      |
| 4.2 <i>Scatter Plot</i> ZPRED dan SRESID..... | 43      |
| 4.3 <i>Normal Probability Plot</i> .....      | 44      |

## DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran   | Halaman |
|--|---------|
| 1 Penelitian Terdahulu.....  | 61      |
| 2 Informasi IKKPD, PAD, <i>Intergovernmenta Revenue</i> ,<br>Ukuran Pemerintah Daerah, dan <i>Leverage</i> ..... | 64      |
| 3 Hasil Pengolahan Data.....   | 68      |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah khususnya pada pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan:

- (1) penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah,
- (2) penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, dan
- (3) administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana maksud pada nomor (1) dilakukan secara teisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana maksud pada nomor (2).

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan “pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan dan kepatuhan”.

Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah harus mengelola keuangan daerahnya secara tertib dan dipertanggungjawabkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi efektif dan efisien.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat, sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APBD kepada masyarakat berupa laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas kepada publik. Pemerintah tidak hanya mempertanggungjawabkan uang yang dipungut dari rakyat, tapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapainya.

Tahap setelah pemerintah daerah melakukan tugas-tugasnya yang dituangkan dalam APBD adalah pengukuran kinerja untuk menilai tugas-tugas yang telah dilakukan. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD mengandung pengertian sebagai suatu informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi (Halim, 2007:94). Menurut Mardiasmo (2009:121) “pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik”.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut

dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:2). Menurut Wilson *et al.* (2010:408) menyebutkan bahwa:

Ensuring that the government has the financial capacity to sustain desired services is the primary reason for managers to monitor financial performance... Decision makers external to the government also need to assess government performance as they decide whether to locate businesses in a city, work for public entities, or invest in municipal bonds

Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial, seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 2009:123). Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas.

Tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya masalah yang terjadi dalam manajemen keuangan daerah yang dikemukakan oleh Nur (2011) yaitu, masih tingginya proporsi anggaran untuk belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai, daripada belanja langsung, baik berupa dana pelayanan publik atau dana investasi yang terkait langsung dengan tujuan organisasi, sehingga mengakibatkan rendahnya nilai kinerja pemerintah di mata masyarakat. Kemudian pendapat dari Atmaja (2010) yaitu, berbagai penyimpangan pengelolaan keuangan

daerah yang disebabkan ketidaktaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berakibat pada terjadinya kerugian daerah. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK khususnya pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terhadap LKPD tahun 2011 yang mengalami peningkatan dari pemeriksaan LKPD tahun 2010 yang menemukan 320 kasus ketidaktaatan terhadap perundang-undangan menjadi 337 kasus senilai 228,133 Milyar pada tahun 2011 yang berakibat pada terjadinya kerugian daerah. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menyatakan bahwa, semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, pengukuran kinerja keuangan daerah adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, karena salah satu kunci sukses dari pembaharuan dalam sektor publik adalah dengan melakukan pengukuran kinerja (Greiling, 2005).

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah PAD (Nasution, 2011), *intergovernmental revenue* (Sesotyaningtyas, 2012), ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* (Sumarjo, 2010). Dari penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor tersebut menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Nasution, 2011) dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Julitawati *et al.*, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sumarjo (2010) menyatakan bahwa faktor *leverage*

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sumarjo (2010) dengan menambahkan indikator pada pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan dengan analisis kemandirian keuangan daerah dan tingkat efektivitas pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (Halim, 2008:232). Tingkat efektivitas pendapatan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 2008:234). Penambahan indikator pada pengukuran kinerja keuangan tersebut sejalan dengan rekomendasi penelitian Sumarjo (2010).

Berdasarkan uraian di atas, perlu diteliti mengenai kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian sebagai berikut: **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam manajemen keuangan daerah seperti, penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang disebabkan ketidaktaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berakibat pada terjadinya kerugian daerah (Atmaja, 2010). Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK khususnya pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terhadap LKPD tahun 2011

yang mengalami peningkatan kasus ketidaktaatan terhadap perundang-undangan dari pemeriksaan LKPD tahun 2010 yang berakibat terjadinya kerugian daerah. Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih rendah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2011), Sesotyaningtyas (2012), dan Sumarjo (2010) mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti, PAD (Nasution, 2011), *intergovernmental revenue* (Sesotyaningtyas, 2012), ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* (Sumarjo, 2010). Berdasarkan penelitian tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Apakah PAD merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah *intergovernmental revenue* merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Apakah *leverage* merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan mencari bukti empiris bahwa PAD, *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintahan, dan *leverage* adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoretis dan praktis.

#### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi mengenai kinerja keuangan khususnya pada pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.
2. Untuk pengembangan konsep dan teori lebih lanjut yang akan digunakan oleh penelitian lainnya yang ingin mengangkat topik yang sama dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Pemerintah daerah, penelitian ini dapat digunakan bagi pemerintah daerah khususnya di 24 pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sebagai bahan masukan mengenai faktor-faktor

yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Masyarakat, menjadi informasi dalam mengamati kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja pemerintah daerah.
3. Akademisi, sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang konsentrasi ilmu akuntansi.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan empat faktor yang memengaruhi kinerja keuangan yaitu, PAD, *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintahan, dan *leverage*. Penentuan faktor-faktor ini berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Pengujian faktor-faktor tersebut dilakukan dengan menggunakan LKPD 24 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009-2011.

### **1.6 Organisasi/Sistematika**

Organisasi/Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 bagian, yaitu Bab I pendahuluan, Bab II tinjauan pustaka, Bab III metodologi penelitian, Bab IV hasil penelitian dan pembahasannya, serta Bab V penutup.

#### **BAB I Latar Belakang**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan organisasi/sistematika.

## BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

## BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

## BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data, dan pembahasan atas hasil analisis data.

## BAB V Penutup

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pada sektor *private* menurut Kieso *et al.* (2011:5) merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini menampilkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan yang diukur dalam nilai moneter. Menurut Harahap (2011:205) menyatakan bahwa:

Laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability*. Sekaligus menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang berisi data-data keuangan. Data-data keuangan ini digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Maka dari itu, laporan keuangan menjadi suatu hal yang penting bagi para pemakainya, karena laporan keuangan menjadi salah satu informasi yang penting dalam proses pengambilan keputusan dan menggambarkan kinerja suatu entitas dalam mencapai tujuannya.

Demikian juga pada sektor publik, organisasi sektor publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik (Mardiasmo, 2009:159). Tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi pemerintah untuk

memberikan informasi kepada publik. Salah satunya informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan atas pelaksanaan APBD, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (PP No. 71 tahun 2010), komponen laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional, menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas, menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu
6. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk akuntabilitas yang menjadi sarana untuk mewujudkan *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia (Sadjiarto, 2000). Dengan demikian, pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Ternyata dalam pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas tidak dapat dipenuhi hanya dengan laporan keuangan saja, tetapi masyarakat ingin adanya pengukuran kinerja keuangan pemerintah (Sadjiarto, 2000). Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan laporan keuangan organisasi pemerintah, yaitu memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi (Mardiasmo, 2009:164).

## 2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Bastian, 2009:329). Untuk mengetahui keberhasilan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur. Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi (Mahmudi, 2010:12). Kesuksesan organisasi, dalam hal ini organisasi sektor publik, digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang murah dan berkualitas (Mahmudi, 2010:12). Menurut Mardiasmo (2009:121) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

1. untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik;
2. untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan; dan
3. untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pada sektor publik, pengukuran kinerja sektor publik sangat penting untuk membantu pemerintah menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur nonfinansial dan finansial (Mardiasmo, 2009:121). Informasi nonfinansial yang dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah *balance scorecard* yang dapat dijadikan tolok ukur dalam pengukuran kinerja sektor publik. Dengan *balance scorecard*, kinerja organisasi diukur dengan melibatkan empat aspek, yaitu aspek finansial, aspek kepuasan pelanggan, aspek efisiensi proses internal, dan aspek pembelajaran dan pertumbuhan (Mahmudi, 2010:143). Kemudian pengukuran kinerja dari informasi finansial

adalah kinerja keuangan yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 2009:123). Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil yang diukur menggunakan indikator keuangan (Nasution, 2011). Menurut Kieso *et al.* (2011:220), untuk mengukur kinerja keuangan digunakan rasio keuangan. Rasio keuangan dijadikan acuan dalam menganalisis kondisi kinerja suatu organisasi (Fahmi, 2012:44).

Rasio keuangan pada anggaran yang telah dibuat, dalam hal ini APBD, dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kondisi kinerja pemerintah daerah (Halim, 2008:232). Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain, rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, dan *debt service coverage ratio* (Halim, 2008:232).

Sementara Sularso dan Restianto (2011) mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan rasio kemandirian keuangan daerah yang menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian Mirza (2012) menggunakan rasio efektivitas pendapatan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah. Sumarjo (2010) mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan rasio efisiensi penggunaan anggaran. Kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan pemerintah daerah baik (Halim, 2008:234). Melalui pengukuran kinerja tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu:

1. berperan dalam memajukan daerahnya dengan menggali seluruh potensi yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Nasution, 2010);
2. merealisasikan PAD secara efektif dengan mengendalikan aset-aset strategis sebagai sumber pendapatan daerah dengan membuat program atau kegiatan yang menunjang realisasi PAD (Kurniati, 2012); dan
3. menggunakan anggaran secara efisien guna menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dalam mewujudkan pertanggungjawaban kepada publik (Kurniati, 2012).

### **2.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Sularso dan Restianto, 2011). Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah berarti partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah semakin tinggi (Halim, 2008:232). Oleh karena itu, dengan semakin tingginya masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

### 2.2.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah

Rasio efektivitas berkaitan dengan keberhasilan suatu kegiatan atau program pemerintah (Mirza, 2012). Rasio efektivitas menurut Halim (2008:234) adalah “kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah”. Oleh karena itu, dengan rasio efektivitas pendapatan daerah, suatu kegiatan atau program pemerintah dalam merealisasikan PAD dinilai efektif apabila kegiatan atau program tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelayanan kepada masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila mencapai minimal sebesar 100 persen, sehingga menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2008:234).

### 2.2.3 Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan keuangan yang efisien akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, sehingga bila keputusan yang diambil berkualitas akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Sumarjo, 2010). Rasio efisiensi penggunaan anggaran digunakan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan telah mencapai hasil (*output*) maksimal dengan menggunakan biaya (*input*) yang terendah. Tingkat efisiensi yang rendah atau di bawah 100 persen menunjukkan kinerja pemerintah daerah semakin baik, sehingga semakin kecil rasio efisiensi atau di bawah 100 persen maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik dalam menggunakan anggarannya (Halim, 2008:234). Oleh karena

itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang tepat untuk menekan belanja daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. Hal tersebut perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatannya sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan tersebut kurang memiliki arti apabila realisasi belanja yang dikeluarkan lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim, 2008:234).

### **2.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, salah satunya yaitu karakteristik pemerintah daerah (Patrick, 2007). Menurut Patrick (2007), karakteristik pemerintah daerah tersebut terdiri dari budaya organisasi, struktur organisasi, dan lingkungan eksternal. Namun, peneliti mengambil struktur organisasi dan lingkungan eksternal sebagai faktor yang memengaruhi kinerja keuangan, karena hal tersebut digambarkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Sumarjo, 2010).

Struktur organisasi dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah diproksikan dengan kemakmuran yang di ukur dengan total PAD dan ukuran pemerintah daerah yang di ukur dengan total aset (Suhardjanto *et al.*, 2010 dalam Sumarjo, 2010). Lingkungan eksternal dalam hal ini diproksikan dengan *intergovernmental revenue* (Patrick, 2007). Adapun faktor lain yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah *leverage* dalam mengukur utang pemerintah daerah (Sumarjo, 2010). *Leverage* itu sendiri dapat menjelaskan karakteristik suatu entitas (Almilia dan Retrinasari, 2007).

### 2.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan ekonomi suatu daerah membutuhkan sejumlah dana yang diperoleh dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah (Nasution, 2011). Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut (Halim, 2012:101).

#### 1. Pajak Daerah

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

#### 2. Retribusi Daerah

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

#### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Halim (2012:104) jenis pendapatan ini

diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), perusahaan milik negara (BUMN), dan perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### 4. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan denda pajak, dan pendapatan denda retribusi (Halim, 2012:104).

Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang baik maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

PAD merupakan sumber penerimaan asli daerah yang digali di daerah tersebut yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya untuk digunakan sebagai modal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik (Nugroho dan Rohman, 2012). Pelayanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja suatu pemerintah (Sumarjo, 2010). Setiap peningkatan PAD akan diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan dan sebaliknya.

### 2.3.2 *Intergovernmental Revenue*

*Intergovernmental revenue* adalah sejumlah transfer dana dari pusat untuk membiayai program-program pemerintah daerah (Nam dan Parsche, 2002). Patrick (2007) mengartikan *intergovernmental revenue*

sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pihak eksternal yaitu, transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Sebagai imbalannya, pemerintah daerah memberikan bentuk akuntabilitas kepada pemerintah pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan pendapatan (Patrick, 2007).

Aiken dan Hage (1968) mengungkapkan bahwa saling ketergantungan antar pemerintah dapat memberikan dampak positif dalam pertukaran gagasan, sumber daya, dan kegiatan yang pada gilirannya meningkatkan kinerja suatu pemerintah. Oleh karena itu, dengan adanya *intergovernmental revenue* pemerintah pusat berharap pemerintah daerah mampu membiayai program-program pemerintah agar dapat meningkatkan kinerjanya.

### **2.3.3 Ukuran Pemerintah Daerah**

Tujuan utama dari program kerja pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, maka harus didukung oleh aset yang baik pula (Mustikarini dan Fitriyani, 2012). Ramsamy *et al.* (2005) menjelaskan bahwa peningkatan ukuran suatu entitas berpotensi mencapai kinerja yang lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan entitas yang memiliki ukuran yang besar umumnya lebih dikenal oleh publik, sehingga tuntutan publik menjadi lebih besar untuk melakukan pengungkapan yang berdampak pula pada tuntutan kinerja yang dimiliki entitas tersebut (Cooke, 1992).

Pemerintah daerah akan cenderung memberikan *good news* dalam mengungkapkan laporan keuangannya. *Good news* tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut (Sumarjo, 2010). Hal ini sejalan dengan pendapat Oyelere *et al.* (2003) yang menyatakan bahwa, entitas yang memiliki ukuran yang lebih besar memiliki kompleksitas yang lebih tinggi, karena para pihak eksternal ingin informasi yang lebih banyak guna pengambilan keputusan investasi yang lebih baik di daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya, fasilitas, dan informasi yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah tersebut.

#### **2.3.4 Leverage**

*Leverage* adalah salah satu cara untuk mengukur seberapa besar entitas dibiayai dengan utang (Fahmi, 2011:62). *Leverage* digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki suatu entitas, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang (Almilia dan Retrinasari, 2007). Menurut Fahmi (2011:62), penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan suatu entitas, karena akan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.

Sumarjo (2010) mengungkapkan hal yang berbeda mengenai *leverage*, bahwa semakin besar *leverage* suatu pemerintah maka kinerja keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut akan semakin baik. Karena entitas yang memiliki *leverage* tinggi akan mendapat pengawasan yang lebih dari kreditor, sehingga pemerintah daerah akan

mengungkapkan lebih banyak informasi terkait dengan kinerjanya untuk menghilangkan keraguan kreditur (Almilia dan Retrinasari, 2007) dan terkadang pemerintah cenderung menyampaikan informasi-informasi positif yang lebih lengkap untuk meyakinkan pihak kreditur (Jensen dan Meckling, 1976). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Patrick (2007) yang mengungkapkan bahwa, kreditur akan mengawasi aktivitas pemerintah daerah agar mendapat jaminan bahwa pemerintah daerah akan membayar atas dana yang dipinjamnya.

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan beberapa kali dengan mengambil sampel dan variabel yang berbeda. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) yaitu "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". Penelitian ini menjadi acuan utama peneliti dalam melakukan penelitian, di mana variabel yang digunakan pada penelitian tersebut adalah PAD, ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, dan *leverage*. Sampel yang diambil yaitu, 125 pemerintah daerah kab/kota dari 333 kab/kota di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Ukuran legislatif dalam penelitian ini

dinyatakan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena masih buruknya pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah. Sementara faktor *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena dengan semakin besarnya *leverage* pemerintah daerah maka pengawasan yang dilakukan oleh kreditor akan semakin ketat. Ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan total aktiva juga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal yang sama terjadi pada faktor *intergovernmental revenue*, karena semakin besar *intergovernmental revenue* maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2011) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal dan PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota di Sumatra Utara menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kab/kota di Sumatra Utara karena semakin tinggi PAD yang digunakan untuk membiayai pelayanan pembangunan maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Serupa dengan yang dilakukan oleh Julitawati *et al.* (2012) mengenai pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kab/kota di Provinsi Aceh yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kab/kota di Provinsi Aceh, sehingga apabila terjadi perubahan PAD sebesar 1% akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah sebesar 2,5%.

Mustikarini dan Fitriasari (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kab/kota di Indonesia tahun anggaran 2007,

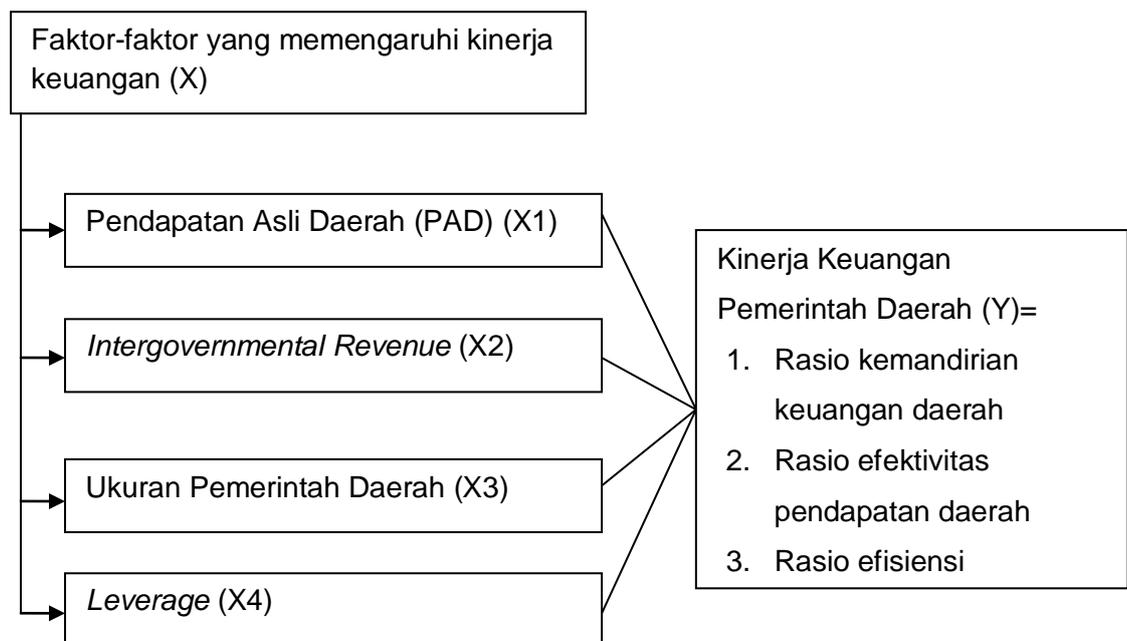
dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa variabel ukuran daerah, kekayaan daerah, dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian tersebut memberikan implikasi kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah dengan ukuran dan PAD yang besar dituntut untuk lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan aset serta kekayaan yang dimilikinya demi pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah daerah dengan tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pusat membuat pemerintah daerah semakin baik dalam melaksanakan tugasnya karena adanya pengawasan oleh pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sesotyaningtyas (2012) mengenai pengaruh *leverage*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian dengan sampel sebanyak 32 kabupaten/kota dari populasi 118 kab/kota. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ukuran legislatif dan pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2010) mengenai pengaruh rasio *leverage* terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang berbeda. Penelitian tersebut dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII) untuk periode 2004-2008. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa, rasio *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu di atas, peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



## 2.6 Perumusan Hipotesis

### 2.6.1 Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PAD merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik (Nugroho dan Rohman, 2012). Untuk melaksanakannya, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan dan meningkatkan PAD pemerintah daerah tersebut, sehingga pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik yang akan mencerminkan kinerja suatu pemerintah daerah.

Penelitian mengenai PAD dilakukan oleh Julitawati *et al.* (2012) dan Nasution (2011) yang mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh terhadap

kinerja keuangan pemerintah. Apabila terjadi peningkatan PAD sebesar 1%, maka kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat 2,5%. Berbeda dengan hasil penelitian Sumarjo (2010) yang menyimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk menguji kembali penelitian Sumarjo (2010) dan berlandaskan pada penelitian Julitawati *et al.* (2012) dan Nasution (2011), hipotesis penelitian berikut dikemukakan:

H<sub>1</sub>: Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota se-Sulawesi Selatan.

#### **2.6.2 Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

*Intergovernmental revenue* adalah dana yang diberikan pemerintah pusat untuk membiayai program-program pemerintah daerah, dengan adanya dana tersebut, pemerintah pusat berharap kinerja pemerintah daerah semakin baik dalam melaksanakan pelayanan publik (Aiken dan Hage, 1968). Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) dan Julitawati *et al.* (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *intergovernmental revenue* dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Besarnya *intergovernmental revenue* menunjukkan bahwa tersedianya dana yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Berbeda dengan hasil penelitian Sesotyaningtyas (2012) yang menyimpulkan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk menguji kembali penelitian Sesotyaningtyas

(2012) dan berlandaskan pada penelitian Sumarjo (2010) dan Julitawati *et al.* (2012), hipotesis penelitian berikut dikemukakan:

H<sub>2</sub>: *Intergovernmental revenue* merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota se-Sulawesi Selatan.

### **2.6.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Ukuran pemerintah daerah yang ditandai dengan besarnya aset suatu pemerintah daerah memberikan indikasi penting mengenai kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar umumnya lebih dikenal oleh publik, sehingga tuntutan publik terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut pun semakin tinggi (Cooke, 1992).

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010), Mustikarini dan Fitriyani (2012) menyatakan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal yang sama tersebut dibuktikan oleh penelitian Suryani (2010) menyatakan bahwa ukuran suatu entitas berpengaruh terhadap kinerja. Berdasarkan hasil penelitian di atas, hipotesis penelitian berikut dikemukakan:

H<sub>3</sub>: Ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota se-Sulawesi Selatan.

#### 2.6.4 Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

*Leverage* menggambarkan seberapa besar struktur modal suatu entitas dibiayai dengan utang. Pemerintah daerah yang memiliki *leverage* tinggi akan mengungkapkan informasi yang lengkap dan positif untuk menghilangkan keraguan kreditor (Almilia dan Retrinasari, 2007 dan Jensen dan Meckling, 1976). Kreditor akan mengawasi aktivitas pemerintah daerah agar mendapat jaminan bahwa pemerintah daerah akan membayar atas dana yang dipinjamnya (Patrick, 2007), sehingga memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) mengungkapkan bahwa semakin besar *leverage* suatu pemerintah maka kinerja keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut akan semakin baik. Karena entitas yang memiliki *leverage* tinggi akan mendapat pengawasan yang lebih dari kreditor. Sejalan dengan penelitian Suryani (2010) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sesotyaningtyas (2012) berpendapat lain. Dari hasil penelitian yang dilakukannya, *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk menguji kembali penelitian Sesotyaningtyas (2012) dan berlandaskan pada penelitian Sumarjo (2010) dan Suryani (2010), hipotesis penelitian berikut dikemukakan:

H<sub>4</sub>: *Leverage* merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota se- Sulawesi Selatan.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

Menurut Sekaran dan Bougie (2009:102) bahwa rancangan penelitian terdiri dari tujuan penelitian, jenis investigasi, *study setting*, unit analisis, dan *time horizon*. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis yang menjelaskan sifat hubungan tertentu dengan investigasi korelasional, karena peneliti ingin lebih lanjut melihat hubungan antara faktor-faktor yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sumber data yang digunakan seluruhnya merupakan sumber data sekunder dengan jenis data adalah data *documenter* yaitu laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini digunakan aplikasi SPSS sebagai program untuk menganalisis data.

Penelitian ini juga menggunakan *study setting noncontrived* yaitu, penelitian yang tidak melakukan perekrutan objek penelitiannya. Unit analisis penelitian ini berupa organisasi yaitu pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. *Time horizon* penelitian ini menerapkan *longitudinal*, yaitu bentuk penelitian yang dilakukan pada lebih dari satu batas waktu untuk menjawab pertanyaan penelitian, dalam hal ini, penelitian menggunakan data laporan keuangan pemerintah daerah selama tahun 2009-2011.